



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : PLN KANTOR PUSAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL NAHWAN**
2. Jabatan : **VICE PRESIDENT PENGENDALIAN KONSTRUKSI JARINGAN JAWA, MADURA, BALI, MALUKU, PAPUA DAN NUSA TENGGARA**
3. NHK : **198640**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.663.075.000**

1. Tanah Seluas 5600 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 929 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 69.675.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/125 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah Seluas 21340 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 213.400.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/135 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 337.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA R15 Tahun 2016, HASIL SENDIRI



	Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	39.000.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	989.084.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	----
Sub Total		Rp.	5.028.159.000
III. HUTANG		Rp.	76.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	4.951.659.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.